

DINAMIKA POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT MUSLIM BALI PADA PILGUB BALI TAHUN 2018

I Gusti Made Arya Suta Wirawan¹, Kadek Sintya Dewi²

¹. Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Ganesha
arthasuta@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi masyarakat yang multikultur menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari politik identitas. Tidak hanya di daerah-daerah, politik identitas pun juga terjadi di Ibu Kota yang mana dampak dari hal tersebut turut mempengaruhi persepsi masyarakat dari luar ibu kota tentang bagaimana seharusnya berpolitik. Salah satu isu terkait politik identitas yang akhir-akhir ini muncul dan tersebar di berbagai daerah adalah larangan bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin non muslim untuk menjadi kepala daerah. Namun bagaimana dengan Pemilihan Gubernur Bali tahun 2018 di mana masyarakat muslim menjadi golongan minoritas dan secara politik tidak memiliki calon gubernur dan calon wakil gubernur dari kalangan mereka sementara ini beberapa kalangan dari masyarakat muslim tengah gencar mengedepankan politik identitasnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan politik identitas masyarakat muslim di Bali sangatlah dinamis terutama dalam situasi di mana mereka menganggap diri mereka sebagai golongan minoritas. Masyarakat muslim Bali tetap memberikan dukungan bahkan memilih pemimpin non muslim sejauh agenda politik dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ada tidak berseberangan dengan politik identitas mereka. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini juga menunjukkan bahwa seluruh pasangan calon melakukan berbagai pendekatan politik terhadap masyarakat muslim Bali yang mana hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa kini masyarakat muslim Bali yang merupakan golongan minoritas memiliki posisi tawar politik.

Kata kunci: politik identitas, masyarakat muslim bali, pemilihan gubernur

ABSTRACT

The condition of a multicultural society causes democracy in Indonesia to be inseparable from political identity. Not only in regions, political identity also occurred in the capital city, where the impact of this also influences people's perceptions from outside the capital about how they should be involved in politics. One issue related to political identity that has recently emerged and spread in various regions is the prohibition for Muslims to choose non-Muslim leaders to become regional heads. But what about the election of the Governor of Bali in 2018 where the Muslim community becomes a minority group and politically does not have a gubernatorial candidate and vice-governor candidate from among them while now some circles of Muslim communities are aggressively promoting their political identity. This research shows that the political identity movement of Muslim communities in Bali is very dynamic especially in situations where they consider themselves to be a minority group. The Balinese Muslim community continues to provide support and even choose non-Muslim leaders as far as the political agenda of the existing governor and deputy governor candidate pairs does not contradict their political identity. By using a qualitative approach this research also shows that all candidate pairs carry out various political approaches to the Balinese Muslim community, which shows that now the Balinese Muslim community which is a minority group has a political bargaining position.

Keywords: political identity, bali muslim society, governor election

². Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Ganesha
sintya09@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sosiologi telah lama melakukan pengkritisan terhadap definisi minoritas bahwa penggunaan konsep tersebut selama ini cenderung melupakan kondisi historis dan sosial masyarakat dan total tidak menyadari bahwa konsep tersebut digunakan secara tidak tepat. Berlawanan dengan definisi minoritas yang telah ada, penggunaan istilah minoritas dalam ilmu-ilmu perilaku manusia (*behavioral science*) tidak berkaitan secara mutlak dengan kuantitas anggota suatu kelompok, melainkan isu kekuasaan (*power*) yang paling esensial (Meyers 1984:8). Dalam konteks ini, konsep minoritas mengandung sekumpulan teori “prejudis” yang tersembunyi (*hidden*) dan mewakili kepentingan kelompok dominan dalam tatanan sosial yang ada (Meyers 1984:8).

Minoritas dengan demikian menurut pandangan Meyers tidak lagi digunakan sebagai label universal terhadap subjek yang dibentuk lewat diskriminasi kolektif. Penekanan yang hanya berfokus pada kuantitas dianggap tidak memiliki landasan ontologis serta mengaburkan ketimpangan kekuasaan (*power inequality*). Konsep tentang minoritas mayoritas selama ini kerap mengabaikan proses dominasi di arena ekonomi, kultural, politik dan sosial. Oleh karena itu, Meyers (1984:11), berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok dan menjadi target kolektif dari perlakuan prejudis, diskriminasi, dan dominasi termasuk dalam kategori kelompok tertindas (*oppressed groups*).

Dalam konteks masyarakat muslim di Bali, melekatnya status minoritas tersebut tidak hanya direlevansikan dengan kuantitas mereka yang lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh populasi penduduk di mana mereka tinggal, namun juga terdapat beberapa asumsi serta persepsi terkait dengan aspek budaya, ekonomi maupun politik yang secara keseluruhan dianggap minoritas. Ditilik dari aspek budaya, kelompok masyarakat muslim cenderung memiliki budaya yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Bali baik dalam hal etnis, bahasa, agama, kebiasaan sosial dan tentunya sejarah. Dari aspek ekonomi, terdapat beberapa ciri yang memudahkan adanya perbedaan dengan masyarakat Bali, yakni: perbedaan jumlah penghasilan, pembagian tanah dan properti, meski akses ke jenjang pendidikan dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi memiliki kondisi yang setara. Sementara dari aspek politik, terdapat enam kategori perbedaan posisi politis dalam masyarakat dan pemerintahan, yakni: lebih sulit untuk mengedepankan calon pemimpin daerah baik bupati maupun gubernur yang sesuai dengan identitas sosial agama dan budaya mereka.

Sejarah panjang menegaskan bahwa masyarakat muslim di Bali bukanlah subjek diskriminasi, bahkan beberapa kawasan di Bali masyarakat ini muncul sebagai subjek utama dalam

pembangunan dan perputaran ekonomi. Meski sempat terjadi gesekan pasca Bom Bali I dan II, namun kontribusi masyarakat muslim dalam perekonomian tersebut tidak hanya disebabkan oleh proses panjang dari perjuangan masyarakat muslim itu sendiri, baik masyarakat muslim Bali pribumi maupun oleh pendatang, tetapi terdapat andil pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat dalam memperlakukan kelompok minoritas tersebut untuk menjadi aktor utama dalam perekonomian. Situasi ini tentunya juga berdampak secara politik. Beberapa dekade terakhir, strategi kampanye politik pasangan cagub dan cawagub kerap menjadikan masyarakat muslim sebagai tujuan perebutan suara. Sebagai contoh saat pilgub tahun 2013 lalu di mana pasangan Puspayoga-Sukrawan mengalami kemenangan yang cukup telak yakni 80 persen di beberapa wilayah yang merupakan pemukiman muslim yakni Kampung Jawa, Kepaon, Monang-Maning (ketiganya di Kota Denpasar), dan Kecicang (Kabupaten Karangasem). Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan jumlah pemilih muslim di empat titik itu lebih banyak dan menyatu.

Hal tersebut tentu tidak terlepas dari adanya komunikasi dan konsolidasi politik pasangan tersebut dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang notebene merupakan partai berideologikan agama Islam. Sementara PKS sendiri bukanlah pengusung Puspayoga-Sukrawan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun dukungan PKS terhadap Puspayoga-Sukrawan bukan tanpa alasan. Dari dua pasangan calon, hanya Puspayoga yang menjalin komunikasi dengan PKS mulai proses pencalonan. Sejak masih menjabat Wali Kota Denpasar, Puspayoga dikenal akrab dengan masyarakat muslim.

Secara politik masyarakat muslim asli Bali maupun pendatang memiliki hak yang sama dengan masyarakat Bali. Di Bali sendiri terdapat beberapa partai agama yang berideologi Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai lainnya, yang dipandang masyarakat umum sebagai partai minoritas dari segi jumlah suara dan perolehan kursi dalam setiap pemilihan umum. Hal yang menarik dalam pemilu 2009 dan 2014, perolehan suara dan perolehan kursi salah satu partai Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup meningkat. Kini makin banyak masyarakat muslim pendatang yang pada akhirnya mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta masyarakat muslim yang kian mantap memilih partai berideologikan agama Islam. Sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2014, dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dusun Wanasari (kampung Jawa) kecamatan Denpasar utara, yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim, jumlah suara pemilih PKS menang telak mengalahkan PDI-P. Fenomena politik di kampung Jawa yang berhasil mengantarkan satu wakil mereka menjadi anggota dewan, berkaitan dengan identitas sebagai warga muslim di kampung Jawa.

Sejak itu, masyarakat muslim di Bali semakin menunjukkan tujuan-tujuan politiknya, mulai dari ruang lingkup komunitas hingga ruang lingkup daerah (provinsi). Semakin maraknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang hadir di ruang publik semakin menunjukkan bahwa masyarakat muslim Bali semakin *confident* dengan ekspresi keagamaannya hingga mencoba untuk mengisi peran serta *bargain* (posisi tawar) politik di dalam perhelatan pemilihan gubernur Bali tahun 2018.

Terkait dengan pemilihan gubernur tersebut banyak masyarakat Bali baik muslim maupun non muslim yang bertanya apakah diizinkan untuk kaum muslimin untuk memilih calon pemimpin non muslim. Munculnya pertanyaan tersebut didasari oleh peristiwa Pilgub DKI tahun 2017 di mana perolehan suara petahana kalah unggul dengan pesaingnya mengingat munculnya fatwa dari MUI yang melarang warga muslim DKI untuk memilih pemimpin non muslim. Pelbagai elemen masyarakat baik dari ormas (organisasi masyarakat), partai politik hingga beberapa tokoh masyarakat lokal turut mendukung persepsi tersebut. Sekalipun beberapa pihak menganggap persepsi tersebut ditengarai merupakan hasil dari reaksi keras umat muslim atas tindakan yang dianggap sebagai penistaan agama oleh Gubernur DKI saat itu yakni Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang secara kebetulan memiliki keyakinan (agama) yang berbeda dengan keyakinan mayoritas penduduk Jakarta. Persepsi ini juga berkembang luas hingga ke luar provinsi DKI. Dukungan terhadap persepsi ini pun diwujudkan lewat pelbagai macam bentuk aksi. Salah satunya aksi Bela Islam 212 yang pesertanya berasal dari pelbagai elemen masyarakat dan tentunya juga dari luar daerah tidak terkecuali provinsi Bali. Situasi ini pun memicu reaksi Polda Bali. Untuk meredam pengerahan massa ke Jakarta pada aksi 'Bela Islam Jilid III' yang menurut rencana digelar 2 Desember 2016, Kapolda Bali, Irjen Sugeng Priyanto mengumpulkan tokoh-tokoh umat Muslim di Bali, mengingat di sudah ada ratusan umat Muslim Bali yang telah mengikuti aksi bela Islam jilid pertama dan jilid ke dua.

Sehubungan dengan keikutsertaan tersebut, adapun Ketua MUI Bali Taufik As'adi menjelaskan, institusinya tidak memiliki kewenangan untuk melarang umat muslim ke Jakarta. Namun MUI Bali tetap mengimbau agar umat muslim Bali cukup berdoa di seluruh masjid di Bali agar proses hukum terhadap penistaan agama dilakukan secara cepat, tegas dan transparan. Ia juga mengkritik bahwa masalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya jangan sampai menyeret umat muslim di seluruh Indonesia. Sementara di Bali sendiri masih ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Sementara, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Roichan Muchlis menjelaskan, masalah penistaan itu sudah dipolitisasi. Umat muslim sudah masuk dalam jebakan politisasi penistaan agama tersebut. Beliau meminta agar umat muslim fokus pada penegakan hukum, jangan sampai

dicampuradukkan dengan politik. Situasi ini tentu merupakan cerminan bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah luput dari melibatkan pelbagai identitas baik itu identitas agama, etnis, suku, ras serta budaya yang kesemuanya itu menjadi variabel yang menentukan partisipasi pemilih. Terlepas dari pro kontra akan persepsi tentang pemimpin tersebut, pada kenyataannya persepsi tersebut sudah merambah luas bahkan menjadi perbincangan dan diskusi di pelbagai komunitas muslim di Bali. Bahkan diskusi tersebut merambah ke sudut-sudut kampus yang tentunya menambah dinamika politik identitas masyarakat muslim itu sendiri.

Sejumlah kalangan menganggap persepsi tersebut merupakan doktrin yang tidak dapat diganggu gugat. Meski kenyataannya dari segi politik praktis, dinamika masyarakat, tak terkecuali masyarakat muslim, akan turut mempengaruhi apakah sebuah doktrin dapat beroperasi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana persepsi tersebut berubah menjadi isu yang melebar dan menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan SARA, yang dikhawatirkan akan dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan untuk mengubah situasi politik yang berujung pada retaknya soliditas (kohesi) sosial.

Isu SARA merupakan sesuatu yang inheren di dalam praktik politik identitas. Situasi ini tentu tidak akan bisa lepas pada masyarakat muslim Bali yang karakternya kian beragam. Dengan beragamnya karakter masyarakat muslim di Bali, baik yang tergolong pribumi maupun pendatang, akan menjadikan situasi politik identitas di kalangan masyarakat muslim menjadi dinamis, dan tentunya akan mempengaruhi situasi politik di Bali itu sendiri mengingat kontestasi politik di kalangan masyarakat lokal (masyarakat Bali) masih berkuat pada identitas-identitas yang bernuansa primordial dan feodalistik, sekalipun isu-isu yang lebih nyata seperti permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan tetap menjadi isu yang masuk ke dalam program-program politik para cagub cawagub yang kesemuanya itu dibungkus dalam balutan wacana *Ajeg Bali*.

Kian hari karakter masyarakat muslim di Bali kian beragam. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya aliran atau mazhab yang masuk ke Pulau Bali. Karakternya yang unik tersebut menjadikan masyarakat muslim di Bali memiliki perbedaan dengan masyarakat muslim di daerah lain. Keberadaannya pun tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu tentang bagaimana provinsi Bali terbentuk. Meski demikian, arus migrasi masyarakat muslim dari pelbagai daerah turut mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan dan juga politik masyarakat muslim di Bali itu sendiri.

Dihubungkan dengan situasi dan konstelasi politik nasional yakni hiruk pikuk Pilgub DKI tahun 2017 yang berefek pada berkembangnya isu SARA yang tengah muncul di kalangan

masyarakat muslim di Indonesia tidak terkecuali di Bali, di mana salah satu isu yang paling mengemuka adalah larangan bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin non muslim, tentunya akan berdampak pada dinamika politik identitas masyarakat muslim Bali itu sendiri. Isu yang berkembang cepat lewat pelbagai media termasuk sosial media tersebut tentu dikhawatirkan akan ditanggapi oleh pihak-pihak tertentu yang mampu merusak soliditas masyarakat bahkan di kalangan masyarakat muslim itu sendiri, terlebih masyarakat Bali akan menyongsong pesta demokrasi lokal mereka yakni Pilgub Bali yang akan diselenggarakan di tahun 2018. Dalam konteks Pilgub Bali tahun 2018, hingga saat ini perwakilan partai-partai Islam seperti PKS dan PPP di Bali lebih banyak memainkan politik yang bersifat moderat yakni tetap berusaha secara inisiatif melakukan konsolidasi kepada sejumlah partai atau pihak-pihak yang nantinya sebagai pengusung para pasangan cagub-cawagub. Meski demikian para politisi di Bali sudah mulai menyadari bahwa masyarakat muslim adalah komunitas yang sangat penting sehingga beberapa di antara mereka juga melakukan komunikasi terbuka sekalipun hal tersebut dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk dari komunikasi politik yang sarat akan kepentingan, sementara wajah politik asli mereka masih menonjolkan sisi-sisi yang primordial dan feodalistik.

Penelitian ini pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa kini masyarakat muslim Bali tengah menggunakan momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali Tahun 2018 sebagai upaya untuk memperjuangkan politik identitasnya. Lewat momentum ini kita tidak saja melihat sejumlah strategi yang dilakukan masyarakat muslim untuk memperjuangkan hal tersebut namun juga dinamika di internal masyarakat muslim itu sendiri di dalam memperjuangkan politik identitasnya. Peristiwa ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa kini masyarakat muslim Bali menjadi kelompok masyarakat yang cukup diperhitungkan oleh para pasangan cagub-cawagub di dalam perolehan suara.

KAJIAN PUSTAKA

Politik Identitas

Manuel Castells (2007:6) mendefinisikan politik identitas sebagai partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang di mana konstruksi identitas berada pada konteks yang selalu diwarnai dengan relasi kekuasaan. Berangkat dari kondisi inilah akhirnya Castells membagi pembangunan identitas politik ke dalam tiga bentuk yakni *legitimizing identity*, *resistance identity* dan *project identity*.

Legitimizing identity, yakni di mana identitas diperkenalkan oleh institusi masyarakat yang dominan untuk memperpanjang dan merasionalisasi dominasi mereka vis a vis dengan aktor-

aktor sosial. Castells (2007:7), menunjukkan bahwa konstruktor identitas dan alasan konstruksi memiliki kemampuan untuk menentukan "isi simbolis dari identitas dan makna budaya bagi mereka dalam mengidentifikasi hal itu atau menempatkan diri di luar itu". Menurut Castells, identitas didefinisikan dalam hubungan kekuasaan yang di mana tidak dapat ditentukan atau dipisahkan dari lingkaran setan hubungan kekuasaan yang sedang berlangsung. Identitas adalah sesuatu yang menghasilkan dan dihasilkan dari suatu masyarakat sipil yang merupakan seperangkat organisasi dan institusi dengan aktor-aktor sosial yang terstruktur dan terorganisir yang mereproduksi konflik. Identitas juga mampu merasionalisasi dominasi struktural.

Resistance identity (Identitas Resistensi) umumnya ditampilkan oleh aktor sebagai bentuk resistensi atas stigmatisasi yang dialami maupun dominasi yang dihadapi, sehingga identitas yang seringkali ditampilkan adalah selalu bertentangan dengan bentuk yang dominan. Identitas resistensi didasari oleh atau dalam aktor yang terkena pengeksklusian yang tidak adil yang mengembangkan resistensi atas dasar kelangsungan hidup terhadap oposisi yang kuat terhadap kekuatan masyarakat dominan.

Project Identity (identitas proyek) lebih kompleks dari semua bentuk identitas yang diungkapkan Castells. Karenanya mereka adalah aktivitas yang paling unik dan yang akan menanggung kekuatan transformasi positif terhadap aturan keras dari derestrukturisasi kapitalisme dan jaringan elit teknologi dan informasi. Castells, menggambarkan bahwa identitas diri dan masyarakat modern telah berubah sebagai struktur baru dalam *network society*. Dalam *Project identity*, identitas yang dibangun ketika aktor-aktor sosial di mana basis material memungkinkan mereka untuk membangun identitas baru, yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan dalam prosesnya terus melakukan transformasi ke dalam keseluruhan struktur sosial yang ada di dalamnya.

Senada dengan Castells, politik identitas menurut Cressida Heyes (dalam Harahap 2014) merupakan tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari 'kaum yang termarjinalkan' dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengikuti pemikiran sosiologi femonologis untuk memahami fenomena yang diselidiki. Interpretasi dilakukan secara hati-hati terhadap data empiris yang dipandang sebagai hasil dari interpretasi. Dengan metode ini, peneliti memahami interpretasi serta pemahaman Masyarakat Hindu Bali terhadap konstruksi identitas mereka. Metode fenomenologi dianggap tepat mengingat sebagian besar analisa yang dilakukan dalam penelitian ini berangkat dari fenomena atau kegiatan-kegiatan nyata atas kegiatan ritual serta mimik (*gesture*) para informan yang kerap menjaga jarak dengan orang di luar komunitasnya. Melalui metode ini, realitas sosial yang hendak dikaji adalah realitas subjektif berupa pemahaman dan pemaknaan, melalui metode ini pengkaji meminta interpretasi subjek pengkajian, kemudian pengkaji melakukan interpretasi terhadap interpretasi subjek tersebut sampai mendapatkan makna. Terdapat tiga titik yang dijadikan lokasi penelitian yakni Kampung Jawa (Kota Denpasar), Kecamatan Gerogak (Kabupaten Buleleng) dan Kecamatan Melaya (Kabupaten Jembrana). Alasan memilih tiga lokasi tersebut dikarenakan ketiganya merupakan wilayah yang merepresentasikan kediaman dan tempat beraktivitas masyarakat muslim pribumi dan muslim pendatang.

PEMBAHASAN

Sketsa Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali

Pada perkembangannya penjelasan tentang situasi politik identitas masyarakat muslim di Bali wajib merujuk pada apa yang disebut Vedi Hadiz (dalam Parimatha 2012), sebagai *localising power*, yakni sebuah proses persebaran lokus kekuasaan dari Jakarta ke ranah lokal, yang membawa konsekuensi pada terbukanya ruang-ruang politik di tingkat lokal. Kondisi Bali yang semakin terbuka memberikan peluang bagi berbagai aktor dengan segudang kepentingan ideologi, politik, maupun ekonomi, saling berinteraksi, bernegosiasi, atau bahkan bertarung memperebutkan ruang publik. Dengan demikian, *localising power* yang sedang berlangsung membuka peluang terjadinya proses renegotiasi ruang publik atau, meminjam istilah yang digunakan Henk S. Nordholt dan Gerry van Klinken (2010), renegotiasi batas-batas. Relasi kuasa antara kekuatan lokal dipertanyakan dengan gencar dan batas-batas identitas lokal digugat kembali.

Proses interaksi masyarakat muslim dengan dunia luar tersebut justru membawa dinamika, pergulatan, atau bahkan ketegangan antar warga di beberapa komunitas muslim di Bali. Satu kelompok warga ingin tetap mempertahankan keagamaan yang mentradisi, sementara kelompok lain bersikap selektif melalui penyesuaian diri dengan *syariat*. Dalam konteks yang lebih harmonis, hubungan masyarakat muslim dengan orang-orang Hindu berjalan baik selama berabad-abad. Masyarakat muslim ikut dalam organisasi *subak* (organisasi pengairan).

Hubungan perkawinan antara Hindu dan Muslim berjalan seperti biasa. Sebagai contoh masyarakat Muslim di Pegayaman, Singaraja, menggabungkan nama-nama Bali dengan nama Muslimnya. Misalnya Ketut Suhrawadi Abbas, Wayan Ibrahim dan sebagainya. Mereka masih melakukan tradisi *mejotan*. Pada hari raya Hindu membawakan makanan kepada orang-orang Muslim. Tentu makanan yang halal. Sebaliknya pada hari-hari raya Islam, orang-orang Muslim membawa makanan kepada para tetangganya yang beragama Hindu. Orang-orang Bali menyebut orang-orang Islam ini dengan sebutan *nyame selam*. Pageh (2013) menjelaskan dalam bahasa Bali *nyame* artinya keluarga satu keturunan yang memuja satu kawitan (asal-usul). Ikatan *nyame* dan kesadaran orang Bali inilah yang disinyalir membantu mencegah terjadinya konflik horizontal ketika Bali di bom dua kali oleh teroris yaitu yang pertama pada tanggal 12 Oktober 2002 dan kedua tanggal 1 Oktober 2005.

Peristiwa ini bukan saja menjadi peristiwa penting bagi Bali tapi juga Indonesia secara nasional dan negara asing secara internasional. Sebagian menganggap bahwa kejadian ini adalah konsekuensi logis dari apa yang orang Bali anggap sebagai harmonisasi. Ketika masyarakat terlena dengan gerak pariwisata yang bekerja secara tidak terkontrol, di mana banyak terjadi konversi filosofi hidup masyarakat Bali yang mulai meninggalkan adat istiadatnya, maka Bom dianggap sebagai *pralaya*, yakni sebuah peleburan terhadap kekuatan dan sifat-sifat jahat, yang memang semestinya dihancurkan. Sebagian lagi menganggap bahwa ini adalah murni tragedi politik. Inilah yang membawa sejumlah kalangan di Bali merasa tertegur dan bertanggung jawab untuk menjaga proses evolutif tersebut. Dari sini munculah wacana yang dinamakan *Ajeg Bali*. *Ajeg Bali* menurut Atmadja (2010) sendiri adalah wacana yang bersifat implikatif karena saat ini ia sudah beralih fungsi menjadi sebuah komoditas politik. Komoditas yang dimaksud adalah bahwa term ini “seolah-olah” menjadi sebuah cita-cita “baru” dalam menjaga kebudayaan Bali yang bagi mereka kini sedang terancam keberadaannya. Mereka ingin Bali menjadi murni milik orang Bali. Sebagaimana Picard (2006:300) yang mengaitkan *Ajeg Bali* yang oleh Orang Bali sendiri dianggap sebagai gerakan fundamentalisme Hindu, melihat bahwa Bali harus dimurnikan kembali karena memang itulah yang dikehendaki seluruh orang Bali. Pendukung wacana ini berpandangan bahwa orang Bali sendirilah yang bisa menyelamatkan Bali. Bali harus bersih dari pengaruh-pengaruh luar yang berpotensi meredupkan kebudayaan Bali. Inilah mengapa sentimen etnisitas juga tidak bisa lepas dari proses berpolitik di daerah (Nawawi 2012).

Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi masyarakat muslim di dalam memperjuangkan politik identitasnya mengingat sebagian dari organisasi masyarakat (ormas) yang mengedepankan identitas agama Hindu dan kesukuan Bali sempat melakukan penyisiran

(*sweeping*) dan labelisasi terhadap daerah atau wilayah yang menjadi kluster masyarakat muslim di Bali dengan kekhawatiran daerah tersebut merupakan tempat beredarnya para teroris. Meski demikian, waktu tengah memperlihatkan bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama mengingat kesadaran untuk membangun komunikasi antar umat dan suku di Bali berjalan dengan baik dan intensif sehingga stigma negatif terhadap masyarakat muslim berangsur-angsur hilang. Hilangnya stigma negatif ini pada dasarnya merupakan hasil konstruksi dari internal masyarakat muslim Bali itu sendiri di mana internal mereka juga melakukan resistensi terhadap segala bentuk wacana atau gerakan yang dapat menimbulkan tercorengnya citra agama mereka sendiri.

Kondisi yang semakin baik ini juga diperlihatkan lewat berbagai momen politik. Seperti halnya dalam penelitian tentang Politik Identitas terkait dengan Masyarakat Muslim yang berjudul Politik Identitas Muslim Kampung Jawa Terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kota Denpasar oleh Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede (2015), menjelaskan bahwa identitas muslim kampung Jawa terkonstruksi dari proses persilangan etnis, agama, pekerjaan, serta budaya antara muslim pribumi dan urban pendatang yang terintergrasi dalam ikatan primordial, seperti: etnis, agama, lingkungan, kedekatan emosional, budaya, dan perkawinan silang. Penelitian yang merupakan Skripsi dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2015 ini menegaskan bahwa kemunculan politik identitas muslim kampung Jawa, merupakan salah satu efek dari resistensi/tekanan dominasi masyarakat Bali, sehingga mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat minoritas di kota Denpasar. Muslim kampung Jawa cenderung memilih partai dengan kesamaan identitas Islam akibat dari konstruksi identitas resisten, serta berharap partai Islam sebagai representasi umat muslim.

Gede (2015) menjelaskan bahwa muslim kampung Jawa berafiliasi menjadi kader, simpatisan, dan pemilih PKS karena sering terlibat melakukan aktivitas sosial dan keagamaan bersama-sama. Salah satu faktor yang menyebabkan muslim kampung Jawa berafiliasi dengan PKS dan memanfaatkan politik identitas, yaitu diusungnya Umar Dany yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh di kampung Jawa, sebagai calon anggota legislatif dari PKS. Dukungan politik muslim kampung Jawa, berdampak pada penguatan PKS sebagai partai berbasis identitas di kota Denpasar. PKS dalam menjaga dukungan komunitas muslim, berupaya melakukan kegiatan yang bermanfaat, peduli, serta memberikan bantuan dengan menggerakkan kader dan simpatisan bersama warga muslim. Problem sosial dan ekonomi di atas tentu merupakan tantangan besar tidak hanya bagi komunitas Muslim dan Hindu untuk saling toleran dan saling berbagi satu sama lain, namun juga bagi pemerintah daerah untuk secara konsolidatif dan terbuka menyelesaikan permasalahan yang ada.

Konsep muslim pada beberapa komunitas muslim dapat diistilahkan sebagai masyarakat muslim yang identik dengan warga dari pulau Jawa. Komunitas muslim terletak di jalan Ahmad Yani kecamatan Denpasar utara misalnya, dan merupakan salah satu daerah kaum muslim tinggal dan menetap. Daerah-daerah Komunitas muslim cukup banyak dan kawasan tersebut memang dijadikan sebagai tempat tinggal para muslim pendatang sejak dulu. Tanah dari komunitas muslim sebagian memang hasil hibah dari kerajaan sebagai contoh kerajaan Badung kepada kaum muslim yang berdagang di pasar Badung. Muslim di Bali didominasi oleh etnis Madura, Jawa, serta beberapa masyarakat muslim dari Karangasem dan Buleleng. Masyarakat di komunitas muslim erat kaitannya dengan proses urbanisasi dan transmigrasi. Pendatang urban dari berbagai daerah dalam dan luar Bali masuk ke kampung Jawa untuk tinggal dan menetap, sehingga menyebabkan variasi dalam budaya masyarakat.

Namun yang menjadi catatan adalah hingga saat ini kisruh politik identitas di Bali tidak mencuat hingga memunculkan kekisruhan politik secara massif. Meski demikian kejadian Pilkada DKI tahun 2017 menjadi catatan penting bagi masyarakat Bali bahwa imbas dari politik identitas di Jakarta mungkin saja bisa mereka dapatkan di pulau Bali. Meski demikian sebagian besar masyarakat muslim Bali tidak terbawa arus dari situasi yang terjadi di Jakarta. Berdasarkan hasil observasi terhadap masyarakat muslim baik di daerah Buleleng, Jembrana dan Denpasar sebagian menegaskan bahwa mereka tetap memilih meskipun calon pemimpin mereka tidak seiman. Berdasarkan hasil observasi juga diketahui bahwa ketegasan masyarakat muslim Bali untuk memilih dikarenakan adanya legitimasi dari Ketua MUI Pusat, Ma'ruf Amin yang meminta agar umat Muslim di Bali ikut berpartisipasi aktif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018. Amin juga mengajak agar masyarakat muslim tidak golput. Ma'ruf yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta kepada umat Muslim Bali untuk menyalurkannya di Pilgub Bali 2018. Sebab, ia menegaskan, tidak memilih alias golput adalah perbuatan tak elok dalam konteks proses demokratisasi di Indonesia. Hanya saja, Ma'ruf menggarisbawahi jika lembaganya yakni MUI merupakan wadah netral pada hajatan politik lima tahunan tersebut. Perkara pilihan politik diserahkan kepada masing-masing individu. Meski menegaskan tak boleh golput, MUI dilarang untuk terlibat aktif sebagai entitas politik pada Pilkada serentak. Pada satu sisi, ia mengimbau umat Islam di Indonesia, termasuk Bali, untuk berkonsultasi dengan ulama perihal kandidat yang akan dipilihnya pada Pilkada serentak mendatang sekalipun tidak ada keharusan dan paksaan sehingga pilihan kembali kepada umat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MUI Bali, KH Muhammad Taufik Asy'adi yang selalu mensosialisasikan agar umat Islam di Bali berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya.

Sosialisasi untuk menekan angka golput di kalangan umat Islam adalah dengan terus mengingatkannya di sela-sela *tausyiah* yang dilakukan oleh ulama di Bali. Sosialisasi dan pendidikan politiknya lebih diarahkan kepada dukungan terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menjaga kondusivitas politik di Bali. Salah satunya dengan mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub 2018. Isu keterpecahbelahan di antara sesama muslim juga turut menjadi perhatian para pemuka agama Islam di Bali. Sebagian sudah memahami perubahan sosial politik yang ada bahwa dampak negatif yang ditimbulkan lewat perhelatan politik adalah disintegrasi sosial. Itulah mengapa sebagian besar ulama di Bali merespon Pilgub Bali 2018 ini dengan menyampaikan dua syarat pemimpin yang layak untuk dipilih masyarakat, yakni yang dapat berbuat adil dan berbuat baik dengan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

Dinamika Politik Identitas Masyarakat Muslim Bali pada Pilgub Bali Tahun 2018

Selama ini perjuangan politik identitas masyarakat muslim Bali dilakukan lewat Partai politik yang berideologikan Islam seperti PPP, PKB, PAN dan PKS. Sementara organisasi masyarakat (ormas) seperti Anshor dan Banser juga turut mewarnai perjalanan politik identitas masyarakat muslim di Bali. Baik partai dan ormas Islam yang berkembang di Bali pada dasarnya merupakan salah satu bentuk legitimasi (*legitimizing identity*) bagi masyarakat muslim Bali itu sendiri sehingga seluruh aktivitas politiknya selalu menggunakan dua kendaraan tersebut mengingat keduanya merupakan dua bentuk organisasi yang legal dan sah secara undang-undang.

Perjuangan politik identitas masyarakat muslim pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang diraskan oleh beberapa komunitas muslim. Hal yang paling mencuat adalah perasaan akan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap belum mengakomodasi kepentingan atau aspirasi masyarakat muslim. Sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa anggota partai dan ormas Islam di Bali (FGD, 15 Mei 2018) menyebutkan bahwa Masyarakat muslim pada akhirnya mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum minoritas yang memiliki keterbatasan akses dalam penentuan kebijakan, seperti dalam perencanaan peraturan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah, karena selama ini masih didominasi oleh masyarakat Hindu Bali. Hal ini berkaitan dengan masih minimnya jumlah wakil rakyat atau anggota dewan di kalangan muslim.

Dalam konteks *resistance identity* Manuel Castells bahwa implikasi politik dari resistensi terhadap minoritas muslim salah satunya, yaitu identifikasi terhadap dirinya sebagai muslim cenderung untuk memilih partai yang memiliki kesamaan identitas Islam. Implikasi tersebut menimbulkan

permainan identitas demi tujuan politik, yaitu politik identitas. Berdasarkan penelitian, salah satu faktor mengapa masyarakat muslim memilih partai yang memiliki kesamaan identitas karena partai islam dianggap dapat mewakili suara umat muslim. Faktor lainnya, yaitu mayoritas partai sekuler di Bali sudah didominasi oleh masyarakat Hindu Bali. Masyarakat muslim dalam menentukan pilihan pada partai Islam karena kesamaan identitas. Identitas tersebut dimanfaatkan masyarakat muslim dalam berpolitik untuk mempermudah proses penyatuan atau integrasi masyarakat di dalam partai islam tersebut.

Masyarakat muslim Bali yang ingin memajukan daerahnya menjadi lebih baik, menginspirasi suaranya, hingga memahami politik, telah menggunakan dan memasukkan nilai-nilai identitas terhadap partai-partai Islam yang berkembang di Bali seperti PPP, PKB dan juga PKS yang tiga tahun terakhir mampu menarik banyak suara sehingga meloloskan satu perwakilan di legislatif. Masyarakat muslim Bali mengandalkan nilai-nilai identitas dalam pendekatan primordial, untuk mengajak dan mendukung warganya berafiliasi dengan beberapa Partai Islam yang cenderung mewacanakan semangat kesamaan etnis, agama dan kesamaan tempat tinggal.

Interpretasi masyarakat muslim di dalam mengidentifikasi dirinya dalam menghadapi kehidupan lingkungan dan sosial masyarakat memunculkan suatu politik identitas. Hubungan politik dan kekuasaan dari identitas, dalam politik identitas, dikonstruksikan dalam pembentukan pembangunan identitas oleh seseorang atau sekelompok orang. Konstruksi sosial dari identitas selalu terjadi dalam konteks yang ditandai oleh hubungan kekuasaan.

Pembentukan identitas resisten masyarakat muslim di Bali dengan demikian merupakan konsekuensi dari identifikasi dirinya sebagai masyarakat minoritas di Bali. Politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Inti dari konsep identitas Castells (2010), yaitu identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial. Jika dalam proses pembentukannya dalam kondisi tertekan (identitas resisten) dengan adanya dominasi pihak lain, maka akan muncul identitas dalam istilah Castells disebut politik identitas.

Secara ideologis langkah partai Islam mengusung calon non-Muslim merugikan karena sebenarnya berlawanan dengan sikap politiknya. Namun secara politik praktis, dukungan parpol Islam terhadap calon pemimpin yang non-Muslim juga dapat memperluas dukungan partai. Beberapa pandangan juga menegaskan bahwa dukungan partai Islam dalam menunjuk

non-Muslim menjadi calon pemimpin daerah menjadi indikasi dan bukti mengenai pramagisme partai. Hal tersebut menghasilkan konsekuensi ideologi partai tidak terlalu menjadi relevan. Diharapkan dalam pilkada ataupun pemilu mendatang seluruh partai politik seharusnya memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada seluruh kadernya. Hal itu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa kegiatan politik bukan hanya semata-mata mengenai pertarungan dan perebutan kekuasaan semata.

Meski demikian, bahkan sebuah partai memiliki ideologi yang sektarian pun harus mampu menempatkan diri sebagai partai untuk masyarakat yang memiliki kejamakan ideologis. Sejumlah partai pada prinsipnya telah melakukan penyesuaian diri terhadap daerah pilihnya sehingga jumlah dukungan adalah yang paling utama. Jika dikontekstualisasikan dengan masyarakat muslim Bali, jauh sebelum PKS muncul di Bali, masyarakat muslim di Bali hanya terfokus pada dua partai yakni Golkar dan PPP. Hingga kini masih banyak masyarakat muslim Bali yang justru lebih berafiliasi secara pragmatis dengan partai nasionalis mengingat sebagian besar masyarakat muslim di Bali berprofesi sebagai pedagang. Dinamika ini akan semakin terus berlanjut dan hingga beberapa masyarakat muslim yang ada lebih menonjolkan identitas profesinya ketimbang keagamaannya. Bahkan dalam sebuah wawancara beberapa informan sudah tidak mau lagi memikirkan bahkan menolak dengan tegas diferensiasi antara masyarakat Hindu dan Islam di Bali yang baginya akan menjadikan sekat di antara keduanya.

Tabel 1. Partai Islam dan Komunitas Muslim Pendukung/Pengusung Masing-Masing Cagub-Cawagub Pada Pilgub Bali Tahun 2018

No	Pasangan	Partai Pendukung / Pengusung	Komunitas Muslim Pendukung
1	Wayan Koster-Cok Ace	PAN, PPP, PKB	Komunitas Muslim Karya Damai di Sidakarya, Warga muslim di wilayah Kuta Badung, Warga Muslim Buleleng.
2	Rai Mantra-Sudikerta	PKS, PBB	Semeton Muslim For Mantra, Kerta (SM4MK), Komunitas Muslim Jembrana, Koalisi Rakyat Bali (KRB), Kampung Muslim Kusamba, Kampung Muslim Gelgel, dan Kampung Jawa Denpasar Utara, kampung Muslim di Klungkung.

Inilah mengapa dukungan terhadap cagub cawagub tidak terlalu menonjolkan sisi primordial. Terlebih wujud silaturahmi dan toleransi di antara masyarakat Bali Hindu dengan masyarakat muslim adalah sesuatu yang tumbuh secara kultural dan tidak mengedepankan pada paksaan dan intimidasi sehingga dukungan terhadap calon non muslim adalah sesuatu yang tidak pernah dipermasalahkan oleh hampir sebagian besar masyarakat muslim di Bali. Inilah yang oleh Zaretsky (1994) dalam Castells (2002: hal 10), *Identity: Must be situated historically* yakni

secara historis persoalan dukung mendukung terhadap pasangan non muslim adalah sesuatu yang dapat mereka terima karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mengusung calon dari kalangan mereka sendiri.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa lebih banyak Partai Islam maupun komunitas muslim yang berinisiatif terlebih dahulu membangun dan menjalin silaturahmi kepada para calon. Menurut pandangan salah satu informan (wawancara 28 Agustus) bahwa tahun ini merupakan momentum yang baik untuk mengangkat identitas keislaman di tengah perhelatan politik akbar ini. *Project identity* mereka pada akhirnya harus dibangun lewat sebuah momen yang terlegitimasi (*legitimize identity*) oleh penguasa yakni pemilihan gubernur (Pilgub). Pada dasarnya tidak banyak momen yang dapat digunakan untuk mengangkat masalah umat hingga ke permukaan selain perhelatan Pilgub ini.

Meski demikian, ada sejumlah faktor yang pada akhirnya sangat menentukan tentang bagaimana masyarakat muslim memilih calon non muslim yaitu komunikasi, figur (*track record*) dan akomodasi kepentingan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Daphne A. Jameson dalam jurnalnya *Reconceptualizing Cultural Identity and Its Role in Intercultural Business Communication* (2007:218-225) menyebutkan bahwa *identity is affected by close relationship* (identitas dipengaruhi oleh hubungan dekat) dan *identity can be negotiated through communication* (identitas budaya bisa dinegosiasikan melalui komunikasi). Sebagai contoh faktor komunikasi yakni ketika terdapat dukungan yang disampaikan umat Muslim di sela-sela buka puasa bersama yang digelar di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jalan Gatot Subroto, Denpasar pada Minggu 20 Mei 2018 silam. Sekitar 500 umat Muslim di Kecamatan Utara, amat antusias mendukung Wayan Koster sebagai gubernur. Mereka optimistis, kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PAN, PKPI, PKB dan PPP itu terpilih sebagai gubernur Bali periode 2018-2023. Sejumlah tokoh Muslim hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Ketua PW NU Bali H Abdul Aziz dan calon anggota DPD RI H Bambang. Selama pertemuan segala bentuk yang berhubungan dengan tujuan politik identitasnya disampaikan secara eksplisit kepada Wayan Koster selaku salah satu calon. Toleransi adalah sesuatu yang terus terucap seolah-olah masalah ini yang paling krusial untuk segera diselesaikan.

Wayan Koster pun melakukan penyesuaian komunikasi politik dengan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa serta penggunaan kata atau kalimat bernuansa Islami hingga memberikan janji politik yakni jika ia terpilih sebagai gubernur Bali kelak, seluruh umat beragama akan dinaungi dan diikutsertakan secara bersama-sama dalam membangun Bali. Isu toleransi akhirnya muncul sebagai salah satu penguat kampanyenya. Koster mengajak untuk

bangun kebersamaan di Bali ini, tanpa boleh sedikitpun ada diskriminasi bagi pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan kelak.

Wayan Koster sendiri berasal dari Kabupaten Buleleng yang merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar di Bali. Dukungan terhadap Wayan Koster juga ditengarai karena PPP yang massanya terbanyak di Buleleng berafiliasi dengan PDIP untuk memenangkan Koster. Inilah mengapa banyak masyarakat dan tokoh muslim di Buleleng banyak yang secara terang-terangan mendukung Wayan Koster untuk menjadi gubernur Bali. Koster selama ini juga dianggap oleh sejumlah pihak memiliki rekam jejak yang bagus di skala pusat (nasional) terutama di bidang pendidikan dan kerap hadir dalam kegiatan lintas agama yang dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa gagasan tentang upaya-upaya membangun toleransi pada masyarakat majemuk. Bahkan di sela-sela kampanyenya Wayan Koster berani memberikan janji untuk peningkatan kuota haji bagi masyarakat muslim di Bali. Di sini dapat disimpulkan bahwa politik identitas pun yang memperjuangkan hal-hal yang berkenaan dengan umat harus mendapatkan legitimasi kekuasaan (*legitimizing identity*).

Begitupula dengan aspek figur yang menjadi tolak ukur bagaimana calon non muslim dipilih oleh masyarakat muslim di Bali. Hasil observasi menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi ketika Tokoh Muslim Jembrana, H Hasan Baraas, saat menghadiri Silaturahmi Tokoh dan Masyarakat Muslim Jembrana dengan Rai Mantra, di Gedung Istambul, Loloan Barat, Kabupaten Jembrana yang dihadiri Calon Gubernur Bali Nomor Urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.

Dalam silaturahmi tersebut, tokoh Muslim Jembrana, H Hasan Baraas, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Rai Mantra yang berpasangan dengan Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), pada Pilgub Bali 2018. H. Hasan Baraas, yang juga tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jembrana menegaskan bahwa ada banyak alasan sehingga pihaknya bersama tokoh dan umat Muslim di Jembrana, mendukung Rai Mantra yakni soal asal-usul serta prestasi (*track record*) Rai Mantra selama memimpin Kota Denpasar. Diketahui bahwa ayah Rai Mantra yakni Prof Ida Bagus Mantra, yang kepemimpinannya dikenang sepanjang masa karena banyak meninggalkan jejak positif bagi Bali terutama bagi umat muslim. Sepanjang kepemimpinan Rai Mantra kehidupan masyarakat muslim di Denpasar selalu kondusif dan bahkan maju dari segi ekonomi. Pembangunan tempat ibadah juga dapat dilaksanakan dengan mudah begitu juga perkembangan pendidikan masyarakat muslim di Denpasar. Semua itu adalah fenomena yang terjadi jauh sebelum Rai Mantra mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur. Ia berharap agar hal itu juga bisa terjadi pada masyarakat muslim di seluruh Bali.

Dinamika masyarakat muslim Bali di dalam mendukung para calon menunjukkan bahwa politik identitas yang muncul mengalami tantangan mengingat tidak semua masyarakat muslim Bali memiliki *project identity* yang sama. Sekalipun hal yang kerap terwacanakan adalah masalah toleransi dan stigma, sesuatu yang bisa memunculkan resistensi mengingat permasalahan toleransi dan stigma mampu membangkitkan kenangan buruk terutama jika dikait-kaitkan dengan Bom Bali I dan II.

Namun hingga kini juga banyak masyarakat muslim Bali yang tetap bersikukuh untuk tidak memilih. Mereka menganggap bahwa keterpaksaan memilih karena tidak ada calon dari muslim dianggap melanggar *aqidah*. Di sini justru mereka melakukan resistensi dengan sesama muslim terutama masyarakat muslim Bali yang dengan tegas memberikan dukungan kepada Cagn. Penguatan identitas, terutama identitas resistensi (*resistance identity*) didasari oleh aktor yang tereksklusi secara tidak adil yang mengembangkan resistensi atas dasar kelangsungan hidup dengan oposisi yang kuat terhadap kekuatan masyarakat dominan. Castells, mengutip dari Scheff yang menyatakan bahwa "identitas resisten timbul dari rasa keterasingan dan kebencian terhadap pengeksklusian yang tidak adil, baik secara politik, ekonomi atau sosial" (2007:9). Fundamentalisme agama dan budaya-budaya yang tidak *mainstream* adalah contoh "pengeksklusian" di mana identitas dibangun secara defensif terhadap institusi dominan dalam rangka membalikkan nilai penghakiman yang menyorot "*otherness*", "diferensiasi" dan "batas" bahwa mereka di sini telah menilai bahwa mereka harus keluar dari hegemonisasi masyarakat muslim Bali secara umum.

SIMPULAN

Kini dinamika politik identitas masyarakat muslim pada Pilgub di Bali pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 1) bagaimana cagub-cawagub membangun komunikasi dengan mereka; 2) figur atau track record cagub-cawagub yang tidak bertentangan dengan ideologi Islam; 3) serta bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat muslim dapat terakomodasi atau tersuarakan pada saat cagub dan cawagub melakukan kampanye.

Politik identitas masyarakat muslim di Bali ke depannya akan selalu bergerak secara dinamis. Tidak hanya diperlihatkan oleh dinamika partai dan juga kadernya, dengan semakin demokratisnya Bali sebagai sebuah provinsi turut menumbuhkan berbagai aliran dan perspektif keislaman menjadi sedemikian tumbuh berkembang dan juga menjadi semakin beragam. Hal ini tidak hanya memberikan tantangan bagi kehidupan antar agama namun juga intra agama Islam itu sendiri yang mana bisa menjadi sebuah permasalahan baru ketika politik

yang ada masih bertumpu pada dukungan-dukungan yang didasari pada kepentingan atau nilai-nilai pragmatis semata.

Dinamika ini juga harus disikapi dengan arif oleh masyarakat Bali non muslim (terutama mereka yang Hindu) untuk semakin memahami bahwa masyarakat muslim pada dasarnya tidak bisa lagi diberikan label atau stigma yang bersifat universal (berlaku sama bagi semua). Mereka harus juga mengerti dan memahami bahwa Bali sebagai pulau dengan benteng yang sangat terbuka pada dasarnya memberikan banyak peluang bagi mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak sehingga jika terdapat hal-hal atau perlakuan yang condong mengarah pada praktek diskriminasi tentu akan menimbulkan reaksi dan resistensi yang berlebihan oleh mereka yang saat ini dianggap sebagai kaum marjinal, baik itu masyarakat pendatang yang beragama Islam maupun non Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- . *The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II*. Oxford: Blackwell.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Ajag Bali: Gerakan Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKIS
- Castells, Manuel. 2007. *The Rise of The Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I*. Oxford: Blackwell.
- Jameson, D. A. 2007. *Reconceptualizing Cultural Identity and Its Role in Intercultural*. Business Communication. *Journal of Business Communication*.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Meyers, Barton. 1984. *Minority Group: An Ideological Formulation, Social Problems*, Vol. 32, No. 1, *Thematic Issue on Minorities and Social Movements*.
- Nordholt, Henk Schulte. 2010. *Bali Benteng Terbuka 1995-2005*. Jakarta: KITLV
- Parimartha, I Gde, Ida Bagus Gde Putra dan Luh Pt.Kusuma Ririen. 2012. *Bulan Sabit di Pulau Dewata: Jejak Kampung Islam Kusamba-Bali*. Yogyakarta: Huma Printing & Design Graphic.
- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal dan Prosiding

- Gede, Gedzha Aldino Putra M., Piers Andreas N., dan Ni Wayan Radita Novi Puspitasari. 2015. *Politik Identitas Muslim Kampung Jawa Terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kota Denpasar*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Harahap, Putri Ramdhani. *Politik Identitas Berbasis Agama*. 2014. *Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III. Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna*. Yogyakarta, 20-22 Mei 2014, 517-527.
- Nawawi, M., Haslinda B. Anriani, dan Ilyas. 2012. "Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 25(3):223–232.
- Pageh, I Made, Wayan Sugiarta, dan Ketut Sedana Artha. 2013. "Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(2):239-248.